

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, Dinas Perhubungan telah berinovasi dalam mengkomunikasikan kebijakan, mengelola sumber daya, membangun disposisi yang positif, dan membentuk struktur birokrasi yang efisien.

1. Komunikasi tentang kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung pada Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana melalui seksi Alat Perlengkapan jalan dilakukan dengan menggunakan media sosial khususnya instagram dan whatsapp dalam penyampaian informasi dan juga pengaduan.
2. Sumber Daya pada Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana telah membangun fondasi yang cukup kuat. Mereka memiliki perlengkapan kerja yang memadai, memastikan keselamatan kerja dalam pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan menjadi prioritas utama.
3. Disposisi pada Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana dilakukan secara jelas dengan mengetahui tugas tiap aparaturnya dan memunculkan respons positif dari masyarakat terhadap layanan pengaduan melalui Instagram dan WhatsApp yang mencerminkan disposisi yang baik.
4. Struktur birokrasi di Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana terorganisir dengan baik. Penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

memastikan konsistensi dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.

5.2 Saran

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, Dinas Perhubungan telah berinovasi dalam mengkomunikasikan kebijakan, mengelola sumber daya, membangun disposisi yang positif, dan membentuk struktur birokrasi yang efisien.

1. Peningkatan Kanal Komunikasi: Selain media sosial, alangkah lebih baik jika Dinas Perhubungan mempertimbangkan penggunaan berbagai saluran komunikasi yang lebih inklusif. Mengadakan pertemuan publik, bekerja sama dengan radio lokal, atau menerbitkan buletin informasi dapat membantu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak memiliki akses ke media sosial. Dengan demikian, informasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan akan lebih merata dan dapat diakses oleh lebih banyak warga.
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meskipun sumber daya pada Dinas Perhubungan Bidang Sarana Prasarana telah mencapai fondasi yang kuat, perlu adanya program pelatihan yang berkelanjutan. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dalam hal pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, layanan dapat ditingkatkan lebih lanjut.

3. Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan masalah terkait infrastruktur ketenagalistrikan adalah langkah yang baik. Seksi APJ dapat lebih mempromosikan layanan pengaduan melalui Instagram dan WhatsApp, serta menyediakan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif melaporkan masalah. Ini akan memotivasi lebih banyak orang untuk berkontribusi pada pemeliharaan infrastruktur.
4. Review dan Peningkatan SOP: Untuk memastikan konsistensi dalam pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu adanya review rutin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP harus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik terbaik dalam industri. Dengan SOP yang diperbarui dan diterapkan secara konsisten, pengelolaan infrastruktur PJU akan lebih efisien.

